

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI Al-Quran dan Terjemahan, Jakarta: Mushaf, 2019.

Buku

Abidin, Muhammad Amin bin Umar, *Raddu Al-Mukhtar ala Al-Durri Al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2003.

Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Alih bahasa Fadhil Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.

Al-Asyi Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Siyasah Ahlul Halli Wa Al-Aqdi : Eksplorasi Eksistensi DPR Dalam Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2021

Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Alih bahasa Fadhil Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000

Asshiddiqie, Jimmly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Indah Populer, 2007

H.A, Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, cet, Jakarta: Kencana, 2003

Heywood, Andrew, *Political Theory: An Introduction 4th. Edition*, Terj. Pengantar Teori Politik, E.Setiyawati, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia, 2012

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Hilal, Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, Makasar: Pusaka Almaida, 2015

Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995

Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni, 2004

Kertapraja, Koswara, *Pemerintah Daerah; Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi*, Jakarta: Inner, 2010

K.A, Pudja Pramana, *Ilmu Negara*, Jogjakarta : Maju Mondar, 2009

- Logemann, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta:Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1975
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cet. Kedua, Yogyakarta : FH UII, 2004
- Maududi, Abdul A'la, *Al-Khalifah Wa Al-Mulk*, Terjemahan Muhammad Al-Baqir, *Khalifah dan Kerajaan*, Cet. IV, Bandung:mizan, 1993
- Machendrawaty, Nanih, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, Bandung: Rosda, 2001.
- Nurcholis, Hanif, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta:Grasindo, 2007
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 2001
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2013
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta : Ombak, 2014
- Prihatmoko, Joko. J., *Pilkada Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2005
- Prodjodkoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*, Jakarta:Sinar Grafika, 2022
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2001
- Sarundajang, *Babak baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta:Kata Hasta, 2005
- Safira, Martha Eri, *Hukum Tata Negara, Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegaraan Di Indonesia*, Ponorogo:Senyum Indonesia, 2021
- Sammudin, Rapung, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021
- Schumpeter, Josep A, *Capitalism, Socialism & Democracy*, New York:Harper and Brother, 1950
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung:Mizan, 1996

- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 2008
- Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam: Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Soemantri, Sri, *Prosedur dan sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2006
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1987
- Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama, 2013
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2020
- Wasistiono, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)*, Bandung: Fokusmedia, 2009
- W.J.S, Poerwasunata, *Kamus Bahasa. "Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga"* Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Jurnal

- Alfoe Niam Alwie, "Konstruksi Filsafat Sosial Al Mawardi", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 6:2, (2012).
- Arhdan, Sandy Mulia, "Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Tahun 2024 Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *UNES LAW Review*, 5:3, (2023).
- Bakry, Mohammad Ryan, "Kedaulatan Rakyat Dan Dialektika Bernegara Dalam Konteks Keindonesiaan," *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 1:1, (2018).
- Harijanti, Susi Dwi, "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri", Jakarta: *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21:4, (2014).
- Hasjmy, Mukhtar Ali, "Konsep Kekuasaan dalam Islam". *al-ijtima'i-International Journal of Government and Social Science*, 3:1, (2016).
- Izani, Mohd, "Islam dan Demokrasi : Cabaran Politik Muslim Di Malaysia dan Indonesia", *Journal Of Southeast Asian*, 10, (2015).

- Kusuma, Mochammad Tommy, dkk. "Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024". *Sosial Yustia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2:2, (2022).
- M. Alifudin Al Islami dan Moh. Agung Surianto, "Analisis Kekosongan Jabatan Guna Mengoptimalkan Kinerja Karyawan Perumda Bank Gresik", *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)*, 3:2, (2022).
- Mahardika, Ahmad Gelora, "Problematisa Yuridis Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2:2, (2022).
- Manengkey, Mario Ferdinandus, "Kewenangan Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Dalam Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara", *Lex Administratum*, 3:6, (2015).
- Marwi, Akhmad, Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram), *Jurnal IUS*, 4:3, (2016).
- Purba, Nahot Martua, Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Studi Terhadap Pengisian Jabatan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015), *Jurnal Krisna Law*, 1:3, (2019).
- Rahmatiah, Siti, "Konsep Manusia Menurut Islam", *Al-Irsyad Al-Nafs: JURNAL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM*, 2:1, (2015)
- Rumokoy, Nike K., "Kedaulatan dan Kesatuan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, 23:9, (2017).
- Sutrisno, Cucu, "Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada", *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 02:02, (2017).
- Zabidi, Ahmad, "Urgensi Kepemimpinan Dalam Kitab Fi Zilal Al-Qur'an". *Jurnal Diskursus Islam*, 05:02, (2017).

Skripsi/Thesis

- Ambarita, Juanson, Analisis Yuridis Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota". Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2023.
- Lagonda, Valensya, Tinjauan Yuridis Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undergraduate thesis, Universitas Sintuwu Maroso, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi 67/PUU/-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi 15/PUU/-XX/2022

Website

Aziz, Abdul, “Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan”, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>, diakses pada tanggal 19 September 2024 pukul 18:18 WIB

David Oliver Purba, “Ini Beda Plt, Pjs, Plh, dan Pj Kepala Daerah”, www.kompas.com, diakses pada tanggal 18 September 2024 pukul 18:13 WIB

Doha, Thomas, “Menghitung Durasi Pemilu dan Pemeilihan Serentak Tahun 2024”, <https://kab-manggarai Barat.kpu.go.id/berita/baca/8068/menghitung-durasi-pemilu-dan-pemilihan-serentak-tahun-2024>, diakses pada tanggal 19 September 2024 pukul 19:21 WIB

<http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization>, diakses pada 22 Agustus 2024 pukul 14:30 WIB.

Kusnandar, Viva Budy, “271 Kepala Daerah akan Lengser sebelum Pilkada 2024”, www.katadata.co.id, diakses 18 September 2024 pukul 18:38 WIB

Tuasikal, Muhammad Abduh, “Kaedah Fikih (3), Ketika Dua Maslahat Bertabrakan”, <https://rumaysho.com/2381-kaedah-fikih-3-ketika-dua-maslahat-bertabrakan.html>, diakses pada tanggal 19 September 2024 pukul 18:06 WIB



LAMPIRAN

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Nama : Nanda Tryana Aurora
NIM : 2008206058
Kelas : 7/B
Kajian Wilayah : Dinamika Politik Pemerintahan Pusat dan Daerah
Topik : Suksesi Kepemimpinan di Pemerintahan Pusat dan Daerah
Judul Skripsi : Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah
Rumusan Masalah :

1. Bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?
2. Apa dampak dari pengisian kekosongan jabatan kepala daerah terhadap stabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah dalam perspektif fiqh siyasah?
3. Bagaimana konsep fiqh siyasah diterapkan dalam pengisian kekosongan jabatan kepala daerah?

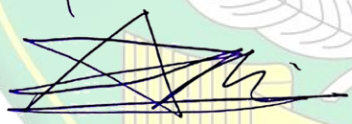
Cirebon, 5 Desember 2023
Yang Mengajukan


Nanda Tryana Aurora
NIM. 2008206058

Mengetahui

Menyetujui
Pembimbing Akademik

Mengesahkan
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam


Am'mar Abdullah Arfan, MH
NIP. 198312122019031007


Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 1985092015031003